



Original Article

Strategi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui Bpbd dalam Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2023

Aldi Maat Syahfutra^{1✉}, Ali Yusri², Agus Mandar³

^{1,2,3} Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Riau

Correspondence Author: aldimaat111213@gmail.com[✉]

Abstract:

Menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tingkat kemungkinan terjadinya bencana alam relatif besar, penanggulangan bencana sangat penting untuk diperhatikan berdasarkan kebutuhan daerah dengan panduan dari pemerintah. Penelitian ini membahas tentang Strategi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu Melalui Bpbd Dalam Penanggulangan Bencana Banjir Tahun 2023. Sepanjang data 2023 tercatat dari total 16 kecamatan di Kabupaten Rokan hulu, 14 kecamatan diantaranya terdampak bencana banjir yang artinya 90% dari jumlah kecamatan yang ada dengan jumlah bencana banjir yang terjadi hingga 76 kali. Adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui strategi penanggulangan bencana yang digunakan pemerintah Kabupaten Rokan hulu melalui BPBD Rokan hulu Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan Teknik pengumpulan data adalah Teknik wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menjelaskan dalam pelaksanaan strategi penanggulangan bencana banjir yang dilakukan sudah optimal berdasarkan kemampuan dan kebutuhan sesuai indikator strategi penanggulangan bencana yakni terbagi menjadi dua bentuk strategi penanggulangan bencana banjir, yaitu strategi structural dan non-struktural, strategi structural sendiri dilakukan dengan dua program yaitu pendidikan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan pengerahan tim reaksi cepat (TRC) sedangkan mengenai strategi non-struktural juga terdapat dua program, yaitu penyaluran bantuan masyarakat dan rehabilitasi korban terdampak bencana. Pemerintah Kabupaten Rokan hulu memilih strategi ini sepanjang tahun 2023 sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan yang ada dan dapat dilaksanakan dengan lancar dan mencapai tujuan yang ditetapkan.

Kata kunci : Strategi, Penanggulangan, Banjir.



<https://jurnal.usk.ac.id/riwayat>

Pendahuluan

Menjadi salah satu negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki tingkat kemungkinan terjadinya bencana alam relatif besar, wilayahnya sendiri

sendiri terletak diantara tiga lempeng utama yaitu Eurasia, Pasifik, dan Indo Australia yang mampu menimbulkan potensi rawan gempa, gunung berapi, tsunami, serta banjir bandang. Selain itu Indonesia berada pada kawasan beriklim tropis yang terdiri hanya dari musim kemarau dan musim hujan, ketika memasuki musim hujan kondisi yang terjadi adalah rawan longsor dan banjir, kemudian di musim kemarau akan menimbulkan kekeringan parah hingga yang paling buruk adalah terjadinya kebakaran hutan (Rizana & Alhadi, 2021).

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana dijelaskan menjadi suatu kejadian atau rangkaian yang berpotensi menjadi ancaman dan menjadi gangguan aktivitas orang banyak dan terjadi karena faktor manusia, faktor dari alam maupun dari faktor non alam sehingga dapat memakan korban, mempengaruhi mental dan kejiwaan, kerugian barang berharga, dan gangguan lingkungan. Sementara bencana alam dijelaskan sebagai peristiwa yang terjadi bersangkutan dengan alam, seperti diantaranya adalah tanah longsor, gempa bumi, tsunami, banjir, dan gunung meletus.

Bencana diartikan sebagai peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis (Hasanah, 2021).

Bencana dibagi dalam tiga macam bentuk bencana. Pertama, bencana alam yaitu yang disebabkan oleh faktor alam seperti gempa bumi, tsunami, erupsi gunung berapi, angin puting beliung dan banjir. Kedua, bencana yang disebabkan oleh faktor non alam seperti gagal teknologi, keracunan atau polusi zat kimia. Dan ketiga, bencana sosial yaitu bencana yang disebabkan oleh ulah tangan manusia seperti konflik sosial. Pengertian bencana ini harus dipahami oleh seluruh pemangku kepentingan dalam bidang kebencanaan. Karena menjadi patokan dalam menentukan suatu kondisi atau kejadian termasuk bencana atau bukan bencana. Perbedaan dalam memahami konsep akan berdampak pada implementasi dilapangan. Munculnya permasalahan seperti kurang koordinasi dan tumpang tindih program (Nurillah, 2022).

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) adalah lembaga pemerintah nondepartemen yang melaksanakan tugas penanggulangan bencana di daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota dengan berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Sesuai dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, maka penyelenggaraan penanggulangan bencana diharapkan akan semakin baik, karena pemerintahan pusat dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab dalam penyelenggaraan dalam penanggulangan bencana.

Pemerintah Daerah pada tingkat kabupaten tentunya tidak bertanggung jawab sendiri dalam mengupayakan terwujudnya penanggulangan bencana yang efektif dan efisien dengan strategi yang matang, hal ini juga di tegaskan dalam Peraturan Bupati Kabupaten Rokan Hulu No 58 Tahun 2023 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja BPBD Kabupaten Rokan Hulu pada pasal 3 ayat 2 bahwa BPBD Kabupaten Rokan Hulu bertanggung jawab dalam perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat dan tepat serta efektif dan efisien. Sinergi dari Pemerintah Daerah sebagai payung yang mengayomi kebijakan dan BPBD selaku

badan pelaksana kebijakan.

Pada proses penanggulangan bencana, BPBD juga memiliki payung lembaganya sendiri pada skala nasional, yakni Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebagai lembaga induk BNPB juga mengeluarkan regulasi sebagai landasan umum dari tugas BPBD pada setiap daerah yang tertera dalam Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 7 Tahun 2022 tentang Rencana Penanggulangan Bencana pada pasal 2 bahwa BPBD bertugas memastikan terlaksananya perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana secara terintegrasi oleh seluruh pemangku kepentingan berdasarkan semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan.

Penanggulangan bencana dilakukan dengan prinsip-prinsip cepat dan tepat, prioritas, koordinasi dan keterpaduan, berdaya guna dan berhasil guna, transparansi dan Akuntabilitas, Kemitraan; Pemberdayaan, Nondiskriminatif, dan Nonproletisi. Yang menjadi tujuan dalam penanggulangan bencana antara lain yaitu; memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman bencana, menjamin terselenggaranya penanggulangan bencana secara terencana, terpadu, terkoordinasi, menyeluruh, menghargai budaya lokal, membangun partisipasi dan kemitraan publik serta swasta, mendorong semangat gotong royong, kesetiakawanan, dan kedermawanan, dan menciptakan perdamaian dalam kehidupan bermasyarakat (Tumanggor & Wibowo, 2021).

Dengan terbitnya UU No 24 Tahun 2007 maka lahirlah kebijakan turunan serta pengarusutamaan perencanaan dan pendanaan penggulungan bencana. UU tersebut secara garis besar mengandung pemahaman penting yaitu pertama, adanya perubahan paradigma kebencanaan yang difokuskan pada prabencana atau pengurangan resiko . Kedua, penanggulangan bencana tidak lagi bersifat reaktif namun lebih terencana dan proaktif. Ketiga, posisi pemerintah pada paradigma baru ini tidak lagi bersifat dominan akan tetapi lebih mengedepankan partisipasi masyarakat dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek, tidak lagi sebagai objek penanggulangan bencana. Keempat , domain penanggulangan bencana tidak lagi menjadi hak mutlak pemerintah pusat tetapi telah terdesentralisasi ke daerah. Dengan kata lain, dalam konteks otonomi daerah, pengurusan penanggulangan bencana juga telah menjadi tanggungjawab daerah, baik dalam wilayah anggaran maupun kebijakan (Robert, 2019)

Tabel 1.Data terjadinya bencana banjir oleh BPS Rokan hulu

Kecamatan Subdistrict	Banjir/Flood		
	2023	2022	2021
(1)	(2)	(3)	(4)
Rokan IV Koto	11	5	10
Pendalian IV Koto	-	2	3
Tandun	5	3	1
Kabun	4	3	2
Ujung Batu	5	-	-
Rambah Samo	5	3	4
Rambah	9	3	4
Rambah Hilir	8	5	5

Bangun Purba	-	1	-
Tambusai	5	5	2
Tambusai Utara	2	-	4
Kepenuhan	7	7	6
Kepenuhan Hulu	2	-	2
Kunto Darussalam	4	1	-
Pagaran Tapah Darussalam	3	-	1
Bonai Darussalam	6	6	5

Sumber: BPS Rokan Hulu 2021-2023

Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik Rokan Hulu, sepanjang terjadinya bencana banjir pada tahun 2023, tercatat sudah berdampak pada 2.678 Keluarga yang tersebar pada 14 dari 16 kecamatan. Menurut BPS Kabupaten Rokan Hulu bencana banjir yang terjadi berdampak besar bagi masyarakat, dampak-dampak tersebut di antaranya:

Menurut data BPS Kabupaten Rokan Hulu, mayoritas masyarakat Kabupaten Rokan Hulu berpenghasilan sebagai petani dan pedagang yang mana dua mata pencaharian tersebut sangat berpotensi terganggu oleh bencana banjir dan menghambat perekonomian masyarakat.

Banjir yang terjadi menenggelamkan rumah warga dalam jumlah yang banyak yang sehingga warga terbatas dalam menjalankan kehidupannya sehari-hari, begitupula halnya dengan fasilitas publik yang terdampak banjir mulai dari rumah ibadah, sekolah, hingga puskesmas yang terdampak bencana banjir jadi tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai fasilitas publik.

Banjir yang terjadi juga berdampak pada lingkungan, sepanjang tahun 2023 banjir yang terjadi menyebabkan tanah longsor yang menutup akses jalan bagi masyarakat hingga rusaknya ekosistem sungai yang menjadi jalur transportasi masyarakat dan salah satu mata pencaharian.

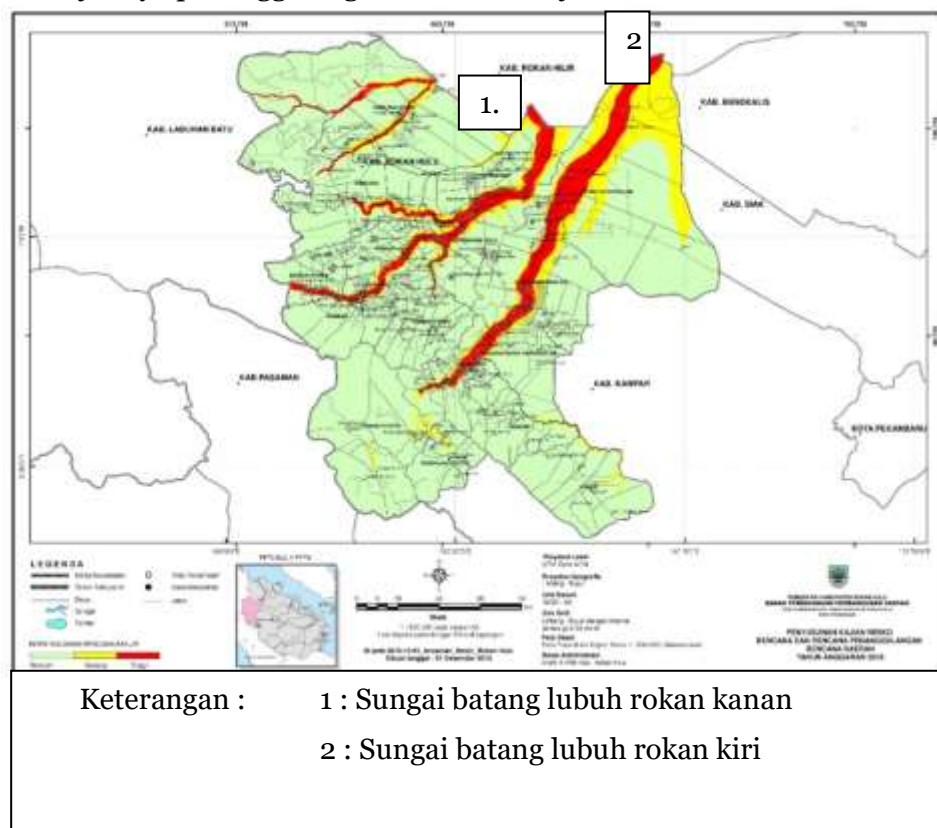
Tabel 2. Data dampak bencana banjir oleh BPS Rokan Hulu

Kecamatan Subdistrict	Banjir/Flood	
	KK	Fasilitas Publ
(1)	(2)	(3)
Rokan IV Koto	223	2
Pendalian IV Koto	-	3
Tandun	215	3
Kabun	342	-
Ujung Batu	212	3
Rambah Samo	270	2
Rambah	310	5
Rambah Hilir	294	3
Bangun Purba	-	-
Tambusai	287	-
Tambusai Utara	131	2
Kepenuhan	112	-

Kepenuhan Hulu	97	1
Kunto Darussalam	84	2
Pagaran Tapah Darussalam	44	-
Bonai Darussalam	57	2
Rokan Hulu	2.678	29

Sumber: BPS Rokan Hulu 2023

Bencana banjir bukanlah bencana baru bagi masyarakat Kabupaten Rokan huu, bencana ini sudah menjadi bencana tahunan yang masyarakat rasakan dan sudah dapat dipastikan bahwa masyarakat sudah merasa sangat jenuh dengan berbagai dampak buruknya. Fasilitas public juga tentu dalam pembangunannya sudah memperhitungkan kondisi sekitar sesuai kebutuhan, namun dengan adanya bencana banjir menyebabkan fasilitas publik tidak hanya tidak dapat beroperasi tetapi juga mengalami kerusakan yang tentunya akan menjadi pengeluaran anggaran lagi bagi pemerintah untuk memperbaikinya. Maka dari itu sangat penting bagi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu untuk mampu memaksimalkan segala upayanya demi terwujudnya penanggulangan bencana banjir melalui BPBD Rokan Hulu.



Sumber : BPBD Rokan Hulu 2023

Gambar 1. Pola Aliran Sungai Potensi Banjir

Terjadinya bencana banjir di Kabupaten Rokan Hulu disebabkan oleh 2 sungai besar yang melintang sejajar yang sebenarnya berasal dari aliran sungai besar yang sama namun terpisah di Kabupaten Rokan Hulu dan dibedakan dengan nama sungai batang lubuh rokan kanan dan sungai batang lubuh rokan kiri. Bencana banjir yang terjadi di Rokan hulu sendiri pada umumnya terjadi di musim hujan dengan

intensitas yang berbeda disetiap penyebarannya.

Berdasarkan data yang didapatkan oleh penulis yang dipaparkan menjadi tampilan tabel sebelumnya, dapat diketahui tentang bencana banjir yang termasuk bencana yang berdampak luas dan hal ini harus menjadi catatan penting tentang bagaimana langkah yang diambil untuk kebijakan sebagai strategi penanggulangan bencana banjir untuk mencegah kerugian besar yang disebabkan oleh bencana banjir yang terdapat di Kabupaten Rokan Hulu karena dengan terjadinya bencana banjir setiap tahun secara tidak langsung sudah menjadi ciri khas tantangan pemerintah setiap tahunnya dan sudah seharusnya mampu evaluasi dan menjadi lebih baik setiap tahunnya. berdasarkan data yang penulis dapatkan dan kemudian diolah untuk bahan penelitian dengan kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam jangka waktu 3 tahun berturut-turut dari Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui BPBD mencatat bahwa 2023 merupakan tahun dengan intensitas terjadinya bencana banjir yang paling tinggi dan berdampak kepada 14 dari 16 kecamatan yang ada, hal ini menjadi catatan evaluasi besar bagi pemerintah daerah mengapa hal ini terjadi.
2. Pada 2 tahun sebelumnya yaitu 2021 dan 2022, intensitas terjadinya bencana banjir mengalami penurunan dari 47 kali menjadi 44 kali, hal ini harusnya menjadi landasan bahwa strategi penanggulangan bencana pada tahun tersebut berhasil, namun pada tahun 2023 bencana banjir terjadi hingga 76 kali yang membuktikan tidak berhasilnya strategi penanggulangan bencana banjir yang ditetapkan untuk tahun itu, perlu adanya evaluasi mengapa hal tersebut dapat terjadi agar tahun berikutnya dapat lebih baik.
3. Pada tahun 2023 Berdasarkan data yang dimiliki Badan Pusat Statistik Rokan hulu bencana tercatat sudah berdampak pada 2.678 Keluarga yang tersebar pada 14 dari 16 kecamatan dan 29 fasilitas umum yang terkendala fungsinya akibat dampak bencana banjir. Bencana banjir yang terjadi sangat berdampak pada kondisi ekonomi masyarakat korban banjir mulai dari kepala keluarga yang tidak dapat pergi bekerja demi mencari nafkah, rumah yang tenggelam akibat banjir sehingga tidak nyaman untuk di tempati hingga fasilitas umum yang tidak dapat digunakan.

Pentingnya strategi dalam penyusunan kebijakan bagi pemerintah bagaikan sebuah kunci dalam membuka harapan terwujudnya tujuan sebuah pemerintahan yang menjadi dasar betapa pentingnya manajemen strategi pemerintahan daerah. Penelitian kali ini sesuai dengan program studi penulis yakni manajemen pemerintahan daerah yang mana membahas mengenai kebijakan yang diambil oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan tugasnya yang kemudian mengerucut pada mata kuliah manajemen strategik pemerintahan yang membahas tentang upaya-upaya yang digunakan pemerintah sebagai strategi dalam mencapai tujuannya.

Banjir merupakan salah satu bencana alam yang sering terjadi di sekitar masyarakat, tapi bukan berarti kita dapat memberikan toleransi atas terjadinya bencana tersebut karena sekecil apapun bencana tersebut tetap saja akan meninggalkan dampak. Terjadi lonjakan intensitas bencana banjir pada tahun 2023 menjadi alasan penulis mengangkat permasalahan penelitian mengenai strategi penanggulangan bencana pada tahun tersebut dengan harapannya dapat menemukan solusi dan menjadi evaluasi bagi pemerintahan Kabupaten Rokan Hulu. Hal lain menarik minat penulis untuk mengangkat permasalahannya untuk dijadikan judul penelitian berdasarkan permasalahan bencana banjir ini sebenarnya telah ada

sejak lama dan juga ditambah pula bahwa bencana banjir tersebut terjadi di wilayah asal penulis yaitu Kabupaten Rokan Hulu sehingga menimbulkan rasa untuk mengetahui strategi penanggulangan bencana yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu agar dapat digunakan sebagai pengetahuan bagi penulis dan pembaca tentang langkah yang benar dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan Hulu Berdasarkan UU 24 tahun 2007.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif, pendapat nazir memaparkan sebagai suatu program yang diterapkan dalam penelitian tingkatan sekumpulan orang suatu objek, suatu keadaan, suatu prinsip, maupun suatu tingkatan kejadian di saat ini (Moleong, 2017) Adapun sasaran menggunakan jenis penelitian deskriptif sendiri adalah membuat gambaran secara terstruktur, factual serta tepat tentang data-data dan karakteristik populasi atau daerah tertentu (Syahza, 2014). Pada penelitian deskriptif, tidak memungkinkan bagi penulis untuk memalsukan ataupun memberikan keistimewaan tertentu pada variabel, namun seluruh aktivitas, peristiwa, kondisi, indikator dan komposisi berjalan seadanya, Penggunaan penelitian deskriptif sendiri juga bertujuan untuk mempermudah penulis mendapatkan data yang lebih maksimal dan agar lebih leluasa dalam proses pengolahan data yang didapat dalam penelitian. Untuk semua variabel yang berhubungan dengan peran yang dilakukan pemerintah Kabupaten Rokan Hulu pada upaya penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Rokan Hulu tentunya akan di kumpulkan untuk di analisis sebagai bahan penelitian oleh peneliti. Teknik pengumpulan data adalah wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yang digunakan yaitu Kondensasi data (*data condensation*), Penyajian Data (*data display*), Penarikan Kesimpulan (*Conclusions drawing*).

Hasil dan Pembahasan

Penanggulangan bencana banjir dalam pelaksanaannya tergantung pada kemampuan dan kebutuhan dan masing-masing daerah, dalam hal ini pemerintah Kabupaten Rokan hulu melakukan penanggulangan bencana sesuai kebutuhan dan kemampuannya pula. Berdasarkan laporan BPBD Rokan hulu sepanjang 2023 terdapat beberapa upaya sebagai strategi penanggulangan bencana banjir oleh pemerintah daerah yang di lakukan oleh BPBD Rokan hulu. Berikut beberapa bentuk penanggulangan bencana tersebut.



Gambar 2. Pendidikan Kesiapsiagaan Bencana oleh BPBD Rokan Hulu di Kantor

Mengenai informasi bentuk dan isi kegiatan pendidikan kesiapsiagaan penanggulangan bencana oleh BPBD Rokan hulu di Kabupaten Rokan hulu, penulis melakukan wawancara langsung kepada kepada bapak Jon Feri H.A. Md selaku Kasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Rokan hulu dengan hasil wawancara bahwa

Dengan pendidikan yang efektif, diharapkan masyarakat lebih siap dan tanggap menghadapi bencana banjir, sehingga dapat mengurangi dampak yang ditimbulkan. Berdasarkan laporan kegiatan penanggulangan bencana oleh BPBD kabupaten Rokan hulu, sepanjang tahun 2023 BPBD Rokan hulu hanya melakukan 1x melakukan Pendidikan kesiapsiagaan kegiatan bencana, yaitu pada 12 Maret 2023 yang berlokasi di Kantor BPBD Rokan hulu dengan mengundang organisasi masyarakat, relawan serta beberapa perwakilan dari setiap desa.

Tabel 3. Indikator Pendidikan Kesiapsiagaan Menghadapi Bencana

Bentuk Kegiatan	Indikator capaian program
1. Pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Setiap desa rawan bencana hadir dan ikut serta dalam pendidikan - Setiap desa memiliki kelompok yang memiliki pengetahuan dasar penanggulangan bencana - Tersosialisasikannya pemahaman mengenai penanggulangan bencana
1. Kampanye kesadaran pentingnya penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat secara umum mengetahui daerah rawan bencana - Masyarakat secara umum mengetahui pentingnya penanggulangan bencana
2. Pemberdayaan komunitas Relawan	<ul style="list-style-type: none"> - Terlibatnya komunitas relawan untuk mempermudah kolaborasi - Masyarakat dapat lebih mengenal komunitas relawan

Berdasarkan penelitian penulis, dalam setiap program yang menjadi strategi penanggulangan bencana tentunya memiliki indikator capaian sebagai tujuan yang diharapkan dari program yang ditentukan dan pelaksanaan program pendidikan kesiapsiagaan bencana juga demikian, indikator yang ditentukan berasal dari program dan lokasi terjadinya bencana dan ada kemungkinan apabila programnya sama namun indikator capaiannya berbeda sesuai kebutuhan masing-masing daerah.

Pendidikan kesiapsiagaan bencana oleh BPBD Rokan hulu sepenuhnya dipandu dan dikelola oleh BPBD Rokan hulu tanpa melibatkan pihak luar, hal ini mempertimbangkan bahwa BPBD Rokan hulu sendirilah yang mengenal dengan bencana yang sering terjadi di Kabupaten Rokan hulu dan juga mengenal secara luas mengenai wilayah-wilayah yang sering terjadinya bencana di Kabupaten Rokan hulu dengan dibekali pengalaman yang ada. Apabila melibatkan pengetahuan atau pengalaman dari pihak lain, khawatir akan ada potensi ketidakcocokan dalam implementasinya sehingga akan mempengaruhi kualitas dari penanggulangan bencana. Mengenai informasi kendala pelaksanaan pendidikan kesiapsiagaan penanggulangan bencana oleh BPBD Rokan hulu di Kabupaten Rokan hulu, penulis melakukan wawancara langsung kepada kepada bapak Afrizal, SP. M. IP selaku Plt. Kepala Pelaksana BPBD Rokan hulu dengan hasil wawancara bahwa (Wawancara, 10 November, 2024)

Tabel 4 Pelaksanaan dan Kendala Kegiatan

Keterangan	Bentuk Kegiatan
Bentuk Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan penanggulangan bencana kepada masyarakat 2. Kampanye Kesadaran pentingnya penanggulangan bencana. 3. Pemberdayaan Komunitas relawan
Kendala Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketidakhadiran beberapa perwakilan desa dan kelompok relawan yang di undang. 2. Keterbatasan inventaris dan alat peraga pendidikan penanggulangan bencana

Pemerintah daerah Kabupaten Rokan hulu, melalui BPBD Rokan hulu perlu melakukan penjangkaran lebih luas dalam pelaksanaan Pendidikan kesiapsiagaan bencana oleh BPBD Rokan hulu, tidak hanya pada lapisan struktur pemerintah desam tetapi juga pada berbagai organisasi kemsyarakatan serta kepemudaan yang sumber dayanya dapat dimaksimalkan dalam sosialisasi Pendidikan kesiapsiagaan bencana, BPBD Rokan hulu juga bisa melibatkan berbagai kelompok relawan yang ada sehingga dapat menjadi wadah berbagi pengetahuan yang optimal

Tabel 5. Pelaksanaan Kegiatan dan Kendala Kegiatan

Keterangan	Bentuk Kegiatan
Bentuk Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelamatan dan evakuasi korban 2. Penilaian awal dan pemantauan bencana 3. Penanganan dampak bencana dan penyediaan bantuan bencana 4. Pelaksanaan evakuasi massal 5. Pemulihan dan Rehabilitasi Pascabencana 6. Pelaporan dan Dokumentasi
Kendala Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Keterbatasan akses lokasi bencana 2. Keterbatasan Sumber daya manusia 3. Keterbatasan logistic dan Peralatan 4. Keterbatasan Anggaran 5. Ketidaksiapan Masyarakat 6. Pengelolaan data dan Informasi

Pemerintah Kabupaten Rokan hulu melalui BPBD Rokan hulu juga memberikan perhatian kepada TRC yang menaruh harapan untuk memaksimalkan pelaksanaan penanggulangan bencana termasuk dengan berbenah dan belajar untuk terus memberikan solusi atas kendala-kendala yang ditemukan, untuk mengatasi kendala-kendala di atas, beberapa langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Kabupaten Rokan hulu melalui BPBD Rokan hulu antara lain:

- a. Meningkatkan pelatihan dan kapasitas personel agar tim TRC lebih siap menghadapi situasi darurat dengan lebih cepat dan efisien.
- b. Memperkuat infrastruktur komunikasi dengan memastikan adanya jaringan komunikasi yang handal dan cadangan (seperti radio satelit atau perangkat komunikasi darurat).

- c. Meningkatkan koordinasi antar instansi dengan menyusun protokol dan prosedur yang jelas dalam menghadapi bencana.
- d. Menambah anggaran dan sumber daya untuk membeli peralatan penanggulangan bencana yang lebih canggih serta memenuhi kebutuhan logistik dan rehabilitasi pasca-bencana.
- e. Melakukan sosialisasi dan edukasi masyarakat untuk meningkatkan kesadaran dan kesiapsiagaan bencana, agar mereka lebih kooperatif saat bencana terjadi.

Dengan mengatasi kendala-kendala ini, TRC BPBD Rokan Hulu dapat bekerja lebih efektif dalam merespons dan mengurangi dampak bencana bagi masyarakat sehingga tujuan untuk penanggulangan bencana banjir dapat tercapai oleh Pemerintah Kabupaten Rokan hulu melalui BPBD Rokan hulu.

Strategi Struktural Penanggulangan Bencana Banjir Rokan hulu 2023

Penyaluran bantuan bagi masyarakat terdampak bencana banjir oleh BPBD Rokan Hulu merupakan bagian penting dalam penanggulangan bencana. Berdasarkan informasi yang penulis dapatkan, penyaluran bantuan masyarakat merupakan kegiatan yang paling menjadi tantangan bagi BPBD Rokan hulu karena membutuhkan koordinasi yang matang dan sigap untuk mendapatkan informasi tentang kebutuhan masyarakat secara akurat dan mampu dengan segera menyalurkannya ditambah juga membutuhkan SDM yang cukup serta tantangan untuk memenuhi kebutuhan dalam penanganan bencana.

Penyaluran bantuan masyarakat bagi korban terdampak bencana banjir berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, diketahui bahwa setiap terjadinya bencana banjir yang tercatat sudah dilaporkan oleh desa ataupun pejabat setempat dan sudah berdampak pada kehidupan masyarakat. Dalam hal ini dapat disimpulkan setiap bencana banjir yang tercatat oleh BPBD Rokan hulu merupakan bencana yang sudah berdampak pada masyarakat dan BPBD Rokan hulu sudah melakukan penyaluran bantuan bencana dan yang membedakan bentuk bantuan bencananya adalah dari ukuran bencana banjir yang terjadi. Berikut adalah beberapa langkah yang biasanya diambil oleh BPBD Rokan hulu dalam penyaluran bantuan masyarakat:

1. Identifikasi Kebutuhan: Melakukan survei cepat untuk mengidentifikasi kebutuhan mendesak masyarakat terdampak, seperti makanan, air bersih, obat-obatan, dan perlengkapan dasar.
2. Penggalangan Dana dan Sumber Daya: Bekerja sama dengan lembaga pemerintah, organisasi non-pemerintah, dan komunitas untuk mengumpulkan dana dan sumber daya yang diperlukan untuk bantuan.
3. Koordinasi Penyaluran Bantuan: Mengkoordinasikan dengan berbagai pihak untuk memastikan distribusi bantuan dilakukan dengan efektif, tepat sasaran, dan tidak terjadi tumpang tindih.
4. Penyediaan Bantuan Logistik: Menyediakan sarana transportasi untuk mendistribusikan bantuan ke daerah-daerah yang terisolasi atau sulit dijangkau.
5. Pusat Penyaluran Bantuan: Membuka posko atau pusat penyaluran bantuan di lokasi strategis agar masyarakat mudah mengakses bantuan yang diberikan.
6. Pelibatan Masyarakat: Mengikutsertakan masyarakat lokal dalam proses distribusi agar lebih tepat sasaran dan memudahkan penyaluran bantuan.
7. Monitoring dan Evaluasi: Melakukan pemantauan untuk memastikan bantuan sampai ke tangan yang membutuhkan dan mengevaluasi proses

penyaluran untuk perbaikan di masa depan.

Dengan penyaluran bantuan yang cepat dan efektif, BPBD Rokan Hulu dapat membantu meringankan beban masyarakat yang terdampak bencana banjir dan mempercepat proses pemulihan. Penyaluran bantuan bencana banjir merupakan hal yang sangat penting dilakukan karena hal tersebut merupakan kebutuhan yang tidak dapat untuk ditawar prioritasnya, kondisi korban bencana banjir yang sedang membutuhkan banyak bantuan baik dari pangan, papan hingga pemulihan emosional semuanya perlu diawali dengan memastikan asupan makanan tetap didapatkan bagi korban banjir.

Tabel 6. Indikator Keberhasilan Penyaluran Bantuan Masyarakat

Bentuk Kegiatan	Indikator capaian program
1. Identifikasi Kebutuhan:	<ul style="list-style-type: none"> - TRC mampu menganalisa dan menentukan apa saja bantuan yang dibutuhkan korban bencana - TRC mampu menentukan skala prioritas kebutuhan bencana yang mana perlu didahulukan
2. Penggalangan Dana dan Sumber Daya	<ul style="list-style-type: none"> - TRC mampu memastikan terbukanya proses penggalangan dana untuk membantu memenuhi kebutuhan korban bencana - TRC mampu memastikan terwujudnya transparansi dan kolaborasi dalam proses pemenuhan bantuan masyarakat korban bencana
3. Koordinasi Penyaluran Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> - TRC mampu melakukan penyaluran dengan koordinasi yang baik dengan pemerintah setempat - TRC mampu memastikan proses penyaluran bantuan sesuai dengan SOP
4. Penyediaan Bantuan Logistik	<ul style="list-style-type: none"> - TRC mampu memastikan tersedianya bantuan logistic bagi korban bencana - TRC mampu memastikan bantuan logistik yang tersedia sesuai dengan kebutuhan korban bencana
5. Pusat Penyaluran Bantuan	<ul style="list-style-type: none"> - TRC mampu menjadi pusat penyaluran bantuan baik dari pemerintah maupun dari luar pemerintah - TRC mampu siap sedia menangani kendala dalam proses penyaluran bantuan bencana
6. Pelibatan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - TRC mampu melibatkan masyarakat setempat dalam penyaluran bantuan sebagai bentuk kedekatan pemerintah dan warganya - TRC mampu mengedukasi masyarakat dalam proses penyaluran bantuan korban bencana
7. Monitoring dan evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - TRC bertanggung jawab memastikan dari awal hingga akhir proses penyaluran bantuan bencana berjalan lancar - TRC mampu menyerap evaluasi saat dan sesudah proses penyaluran bantuan bencana

Mengenai informasi kendala pelaksanaan penyaluran bantuan bencana oleh BPBD Rokan hulu di Kabupaten Rokan hulu, penulis melakukan wawancara langsung kepada kepada bapak Afrizal, SP. M. IP selaku Plt Kepala Pelaksana BPBD Rokan hulu dengan hasil wawancara bahwa (Wawancara, 10 November, 2024)

“Penyaluran bantuan umum bencana itu dilakukan oleh BPBD Rokan hulu karena BPBD merupakan kelompok diluar korban bencana yang lebih dahulu datang dan bertanggung jawab dalam menangani bencana, beberapa tim dikondisikan untuk menjemput bantuan yang datang dan beberapa tim dikondisikan untuk mempersiapkan penyaluran.”

Berdasarkan penelitian penulis, sumber bantuan umum bagi korban bencana pada hari-hari pertama terjadinya bencana bersumber dari anggaran BPBD Rokan hulu, umumnya disalurkan dalam bentuk bantuan makan siang dan dapur umum karena dinilai praktis dan sesuai kebutuhan bagi korban bencana dan sembari itu juga BPBD Rokan hulu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait yang dapat memberikan bantuan untuk tahap selanjutnya seperti dinas sosial dalam menyediakan paket sembako bagi setiap warga yang terdampak banjir juga bantuan peralatan kebersihan, sementara dinas kesehatan membantu dengan penyaluran obat-obatan ringan seperti obat salap gatal-gatal akibat terkena banjir, obat-obatan luka ringan dan sebagainya.



Gambar 3. Penyaluran Bantuan Umum Melalui Bpbd Rokan Hulu

Mengenai penyaluran bantuan masyarakat oleh BPBD Rokan hulu di Kabupaten Rokan hulu, penulis melakukan wawancara langsung kepada Ibu Intan Permata Sari selaku masyarakat korban banjir di Kabupaten Rokan hulu dengan hasil wawancara bahwa (Wawancara, 10 November, 2024)

“kalau untuk bantuan bencana korban banjir itu selalu ada, memang selalu kami lihat dari BPBD lah yang menyalurkan, ada yang mendata dulu setiap rumah berapa orang dan memastikan korban menerima bantuan dengan jumlah yang cukup”

Berdasarkan keterangan BPBD Rokan hulu, pelaksanaan penyaluran bantuan bencana banjir dilakukan setiap terjadinya bencana banjir yang berdampak minimal lebih dari 1 dusun dan dilapokan oleh pemerintah desa setempat telah membutuhkan bantuan uluran tangan dari pemerintah Kabupaten Rokan hulu melalui BPBD, jenis uluran bantuan yang diberikan juga menyesuaikan dengan skala bencana dan barnag-barang yang dibutuhkan.

Mengenai informasi kendala dalam kegiatan yang ditemukan dilapangan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan masyarakat oleh BPBD Rokan hulu di Kabupaten Rokan hulu, penulis melakukan wawancara langsung kepada bapak Yasmin, S.Pd, M.Pd selaku Kedaruratan dan Logistik BPBD Rokan hulu dengan hasil wawancara bahwa (Wawancara, 10 November, 2024)

“Pelaksanaan penyaluran bantuan masyarakat itu tidak bisa kita

pungkiri pasti ada kendala yang ditemukan baik itu akses yang sulit dijangkau, keterbatasan logistik tidak sebanding dengan yang diperlukan, keterbatasan SDM penyalur juga karena korban banjir itu luas, belum lagi keterbatasan informasi mengenai korban yang tidak terdata dan baru tahu Ketika sudah dilapangan, ada juga koordinasi yang kurang optimal sehingga menghambat kinerja bahkan hingga kendala keamanan yang menghambat proses penyaluran bantuan”

Penyaluran bantuan bencana banjir bagi masyarakat di Kabupaten Rokan Hulu oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah) sering kali dihadapkan pada sejumlah kendala. Beberapa kendala yang ditemukan sepanjang penanggulangan bencana banjir pada tahun 2023 antara lain:

a. Aksesibilitas yang Terbatas:

Kabupaten Rokan Hulu memiliki banyak daerah yang terisolasi dan sulit dijangkau, terutama setelah terjadinya bencana banjir. Jalan-jalan utama dan infrastruktur lainnya seringkali rusak atau terendam banjir, sehingga tim BPBD dan bantuan logistik kesulitan untuk sampai ke lokasi yang membutuhkan.

b. Keterlambatan Logistik:

Keterlambatan dalam pengiriman bantuan logistik, seperti makanan, pakaian, obat-obatan, dan perlengkapan lainnya, bisa terjadi akibat faktor cuaca, kerusakan infrastruktur, atau kurangnya transportasi yang memadai. Hal ini menghambat proses distribusi yang tepat waktu.

c. Keterbatasan Sumber Daya:

BPBD seringkali menghadapi keterbatasan dalam jumlah personel, dana, dan peralatan untuk menangani bencana secara efektif. Dalam situasi bencana besar, kebutuhan akan tenaga kerja dan peralatan meningkat secara signifikan, namun anggaran dan tenaga yang tersedia mungkin tidak mencukupi untuk menjangkau semua wilayah yang terdampak.

d. Keterbatasan Data dan Informasi

Tantangan lain adalah kurangnya data yang akurat dan tepat waktu mengenai jumlah korban, lokasi yang terdampak, dan kebutuhan bantuan. Ini bisa menyebabkan bantuan tidak tepat sasaran atau penyalurannya tidak merata, terutama di daerah yang sulit dijangkau atau belum terdata dengan baik.

e. Koordinasi yang Tidak Optimal

Koordinasi antar instansi pemerintah, lembaga kemanusiaan, dan masyarakat setempat kadang-kadang belum optimal. Terjadinya tumpang tindih dalam penyaluran bantuan atau, sebaliknya, adanya wilayah yang terabaikan karena kurangnya komunikasi yang efektif antara pihak-pihak terkait.

f. Kondisi Keamanan

Setelah terjadinya bencana, ada kemungkinan terjadinya ketegangan atau kerusuhan sosial di beberapa daerah, terutama jika ada ketidakpuasan terhadap distribusi bantuan atau persaingan untuk mendapatkan bantuan. Hal ini bisa mengganggu proses distribusi bantuan dan membahayakan tim yang terlibat dalam penanganan bencana.

Penanganan dan penyaluran bantuan bencana memerlukan koordinasi yang sangat baik, baik antara pemerintah daerah, BPBD, TNI/Polri, masyarakat, serta lembaga-lembaga bantuan lainnya. Pemerintah daerah dan BPBD perlu terus meningkatkan kapasitas serta merencanakan strategi yang lebih efisien untuk mengatasi kendala-kendala ini dalam rangka mempercepat penyaluran bantuan dan

memastikan masyarakat yang terdampak menerima bantuan dengan tepat dan adil.

Tabel 7. Pelaksanaan Kegiatan dan Kendala Kegiatan

Keterangan	Bentuk Kegiatan
Bentuk Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Identifikasi Kebutuhan 2. Penggalangan Dana dan Sumber Daya 3. Koordinasi Penyaluran Bantuan 4. Penyediaan Bantuan Logistik 5. Pusat Penyaluran Bantuan 6. Pelibatan Masyarakat 7. Monitoring dan Evaluasi
Kendala Program	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akseibilitas lokasi terbatas 2. Keterbatasan logistik 3. Keterbatasan sumber daya 4. Keterbatasan data dan informasi 5. Koordinasi yang tidak optimal 6. Kondisi Keamanan

Penyaluran bantuan bencana banjir oleh BPBD Rokan hulu menurut penulis juga sangat membutuhkan referensi dari daerah lain atau lembaga lain yang mampu melakukan penyaluran bantuan bencana dengan efektif dan efisien, seperti BAZNAZ, ACT maupun organisasi yang berpengalaman dalam menyikapi bencana terkhususnya dalam penyaluran bantuan, BPBD Rokan hulu baiknya melakukan kunjungan atau pembelajaran pada lembaga tersebut agar kedepannya lebih baik dalam penyaluran bantuan bagi korban bencana banjir.

Rehabilitasi korban terdampak bencana

Rehabilitasi pascabencana adalah serangkaian upaya yang dilakukan setelah terjadinya bencana untuk memulihkan dan memperbaiki kondisi sosial, ekonomi, serta lingkungan yang terdampak oleh bencana. Tujuan utama dari rehabilitasi pascabencana adalah untuk mengembalikan kehidupan masyarakat dan daerah yang terkena bencana ke kondisi yang lebih baik atau setara dengan sebelum terjadinya bencana, sekaligus memperkuat ketahanan agar lebih siap menghadapi kemungkinan bencana di masa depan.

Mengenai informasi kendala dalam kegiatan yang ditemukan dilapangan dalam pelaksanaan penyaluran bantuan masyarakat oleh BPBD Rokan hulu di Kabupaten Rokan hulu, penulis melakukan wawancara langsung kepada bapak Yasmin, S. Pd, M. Pd selaku Kasi Rehabilitasi dan Rekonstruksi BPBD Rokan hulu dengan hasil wawancara bahwa (Wawancara, 10 November, 2024)

“BPBD Rokan hulu dalam melakukan menentukan Langkah rehabilitasi dan rekonstruksinya ada tahapannya, dimulai dengan mengidentifikasi dampak bencana untuk menentukan Langkah yang tepat dan menentukan skala prioritas, kemudian pelaksanaan program kemudian monitoring dan evaluasi untuk memastikan program yang dilaksanakan sesuai sasaran ”

Dengan langkah-langkah tersebut, BPBD Rokan Hulu berupaya mendukung korban bencana banjir dalam proses rehabilitasi, memulihkan kondisi kehidupan mereka, dan membangun ketahanan masyarakat di masa mendatang. Berdasarkan

penelitian yang penulis lakukan, BPBD Rokan hulu sangat minim melakukan rekontruksi pascabencana banjir sepanjang tahun 2023 karena bencana banjir yang terjadi tidak menyebabkan daya rusak yang kuat namun memiliki intensitas yang tinggi hingga pada tahapan pascabencana BPBD Rokan hulu sepanjang tahun 2023 lebih menitikberatkan pada rehabilitasi korban bencana banjir.

Tabel 8. Indikator Keberhasilan Rehabilitasi Korban Bencana

Bentuk Kegiatan	Indikator capaian program
- Identifikasi Korban dan Kebutuhan	- TRC mampu menentukan rehabilitasi apa yang dibutuhkan oleh korban bencana - TRC mampu memastikan korban bencana mendapatkan kebutuhan rehabilitasinya
- Kesehatan dan Kesejahteraan	- TRC mampu memastikan korban bencana mendapatkan bantuan kesehatan - TRC mampu memastikan kesejahteraan dan keamanan korban bencana
- Monitoring dan Evaluasi	- TRC mampu memastikan proses rehabilitasi korban bencana berjalan dengan baik - TRC mampu memastikan melakukan evaluasi rehabilitasi disaat dan sesuai terjadinya bencana untuk meningkatkan kualitas program

Mengenai informasi kendala dalam kegiatan yang ditemukan dilapangan dalam rehabilitasi masyarakat korban bencana oleh BPBD Rokan hulu di Kabupaten Rokan hulu, penulis melakukan wawancara langsung kepada bapak bapak Afrizal, SP. M. IP selaku Plt Kepala Pelaksana BPBD Rokan hulu dengan hasil wawancara bahwa (Wawancara, 10 November, 2024)

“Mengenai program rehabilitasi korban bencana, BPBD Rokan hulu terkendala dari keterbatasan anggaran dan sumber daya berupa perkakas yang menunjang pelaksanaan rehabilitasi agar lebih efisien, ada juga pada saat terjadinya bencana kami kekurangan personil yang mahir ”

Berdasarkan penelitian penulis, pelaksanaan rehabilitasi dan rekontruksi bencana banjir oleh BPBD Rokan hulu sepanjang tahun 2023 dilaksanakan tidak sepenuhnya berdasarkan strategi yang direncanakan, terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti berikut:

a. Keterbatasan Anggaran dan Sumber Daya

Keterbatasan anggaran yang dialokasikan untuk rehabilitasi menjadi salah satu kendala utama. Tingginya intensitas bencana banjir yang terjadi serta luasnya jangkauan bencana banjir yang terjadi memerlukan dana yang sangat besar. Anggaran yang terbatas seringkali menyebabkan pemulihan

berjalan lambat atau tidak dapat mencakup semua sektor yang membutuhkan perbaikan infrastruktur, maupun kegiatan sosial lainnya.

b. Keterbatasan Tenaga Kerja dan Keahlian

Proses rehabilitasi membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak, baik untuk perbaikan infrastruktur maupun untuk pemulihan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Terkadang BPBD atau pemerintah daerah kesulitan menggerakkan cukup banyak tenaga kerja terlatih dalam waktu yang bersamaan. Selain itu, dalam beberapa kasus, keahlian khusus seperti teknik konstruksi, Kesehatan, psikologi serta rehabilitasi lingkungan juga diperlukan untuk memulihkan daerah yang terdampak.

Tabel 9. Pelaksanaan Kegiatan dan Kendala Kegiatan

Keterangan	Bentuk Kegiatan
Bentuk Program	1. Identifikasi Korban dan Kebutuhan 2. Kesehatan dan Kesejahteraan 3. Monitoring dan Evaluasi
Kendala Program	1. Keterbatasan anggaran dan sumber daya 2. Keterbatasan Tenaga kerja dan keahlian

Sepanjang terjadinya bencana banjir pada tahun 2023, selama BPBD Rokan hulu mencatat kejadian tersebut sebagai bencana banjir yang tercatat berdampak bagi kehidupan masyarakat maka BPBD Rokan hulu juga sudah menentukan bahwa harus ada langkah upaya rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana yang harus dilakukan, tindakan terkecil yang dilakukan adalah dengan memastikan kondisi kesehatan dan psikologis korban terdampak bencana banjir dapat dipastikan aman yang kemudian ditutup dengan monitoring dan evaluasi kinerja sehingga mampu memberikan jaminan tuntas kepada masyarakat korban bencana banjir.

Pada akhir data penelitian yang penulis dapatkan, strategi penanggulangan bencana banjir yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Rokan hulu didominasi oleh strategi non-struktural, hal ini disebabkan strategi non-struktural lebih memungkinkan untuk dilakukan oleh pemerintah daerah kabupaten rokan hulu melalui BPBD Rokan hulu sesuai dengan kemampuan yang dimiliki, sedangkan strategi structural tidak menjadi prioritas pemerintah daerah Kabupaten Rokan hulu, karena pada tahun-tahun sebelumnya sudah melakukan koordinasi program strategi structural dengan melibatkan dinas-dinas dan pihak terkait sehingga pada tahun 2023 disaat banjir sedang mengalami intensitas tertingginya, strategi non-struktural adalah hal paling tepat untuk menjadi prioritas dalam penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Rokan hulu.

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis tentang Strategi Pemerintah Kabupaten Rokan Hulu melalui BPBD Dalam Penanggulangan Bencana Banjir tahun 2023 dapat disimpulkan bahwa strategi penanggulangan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan hulu melalui BPBD Rokan hulu lebih memprioritaskan pada strategi non-struktural dibandingkan strategi structural, hal ini disebabkan lebih sesuai dengan kemampuan BPBD Rokan hulu dan kebutuhan masyarakat korban bencana banjir di Kabupaten Rokan hulu.

1. Strategi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan hulu melalui BPBD Rokan hulu sepanjang tahun 2023 melakukan 2 kegiatan sebagai strategi non-structural sebagai upaya penanggulangan bencana, yakni :
 - a. Pendidikan kesiap-siagaan menghadapi bencana
 - b. Pengerahan Tim Reaksi Cepat

Penentuan startegi non-structural yang ditentukan berdasarkan tingkat bencana yang terjadi dan kemampuan BPBD Rokan hulu, mengingat bencana yang terjadi merupakan bencana banjir yang disebabkan akibat tingginya curah hujan yang artinya tidak menyebabkan kerusakan atau dampak yang sangat merugikan seperti bencana lainnya dan juga karena bencana yang terjadi juga merupakan bencana yang rutin terjadi, maka pemerintah daerah Kabupaten Rokan hulu melalui BPBD Rokan hulu hanya terfokus melakukan 2 kegiatan strategi non-struktural sebagai upaya penanggulangan bencana dan dilakukan dengan lancar hingga mampu mencapai tujuan dari kegiatan yang telah ditentukan.

2. Strategi penanggulangan bencana yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rokan hulu melalui BPBD Rokan hulu sepanjang tahun 2023 melakukan 2 kegiatan sebagai strategi structural sebagai upaya penanggulangan bencana, yakni :
 - a. Penyaluran bantuan Masyarakat
 - b. Rehabilitasi korban terdampak bencana

Penentuan startegi structural yang ditentukan berdasarkan tingkat bencana yang terjadi dan kemampuan BPBD Rokan hulu, bencana yang terjadi masih berdampak besar pada aktifitas keseharian masyarkat dan tidak terlalu berdampak dalam kerusakan objek akibat bencana dan strategi structural yang tepat sasaran adalah dengan terfokus pada tujuan pemulihan kondisi masyarakat korban bencana, maka pemerintah daerah Kabupaten Rokan hulu melalui BPBD Rokan hulu hanya terfokus melakukan 2 kegiatan strategi struktural sebagai upaya penanggulangan bencana dan dilakukan dengan lancar hingga mampu mencapai tujuan dari kegiatan yang telah ditentukan.

Berdasarkan penelitian penulis mengenai strategi penanggulangan bencana banjir di Kabupaten Rokan hulu oleh BPBD Rokan hulu pada tahun 2023 meskipun tidak dilaksanakan dengan banyak program yang variatif namun program yang sudah dilaksanakan sudah tepat sasaran sesuai dengan kondisi dan jenis bencana yang terjadi, sementara itu penulis menilai perlu adanya evaluasi menyeluruh untuk mengetahui solusi yang harus disiapkan di masa yang akan datang demi menekan tingginya tingkat terjadi bencana banjir di Kabupaten Rokan hulu.

Daftar Pustaka

- Ali, M., Asidah, E., & Husmiati, H. (2019). Peran Pemerintah Daerah Terhadap Penyelesaian Permasalahan Korban Bencana Gempa (Studi Di Dinas Sosial Kabupaten Lombok Barat). *JIAP (Jurnal Ilmu Administrasi Publik)*, 7(2), 153. <https://doi.org/10.31764/jiap.v7i2.1273>
- Djadjuli, R. D. (2018). Peran Pemerintah Dalam Pembangunan Ekonomi Daerah. *Jurnal Dinamika, Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 5(2), hal. 10.
- Elok, A (2012). *Pemulihan Pascabencana Alam*, (Surabaya: PT. Dinamika Cahaya

- Pustaka, 2012),39
- Eka Prastiyani, A., & Solikin, A. (2022). MEKANISME PELAKSANAAN ANGGARAN KEGIATAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCABENCANA OLEH PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN PURWOREJO. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi Unsurja*, 7(1), 1–13. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jbau/article/view/858>
- Fauzi, A (2018). *Panduan Tanggap Darurat Bencana Banjir*, (Jakarta: Esensi Erlangga, 2018),142
- Hardiyanto, S., & Pulungan, D. (2019). Komunikasi Efektif Sebagai Upaya Penanggulangan Bencana Alam di Kota Padangsidempuan. *Jurnal Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 3(1), 30–39. <https://doi.org/10.30596/interaksi.v3i1.2694>
- Harijoko, A (2020). *Manajemen Penanggulangan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana di Indonesia*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2011),1340
- Hasanah, D. I., Adiwilaga, R., & Nurjanah, H. (2021). Fungsi Koordinasi Pemerintah Kelurahan Andir Dan Penanggulangan Bencana Daerah Terkait Penanggulangan Banjir Di Kelurahan Andir Kecamatan Baleendah Kabupaten Bandung. 5(2), 80–98.
- Huberman, A. M., B. Miles, M., & Saldaña, J. (2019). Qualitative Data Analysis. *Research Methods for Publik Administrators*, 162–170. <https://doi.org/10.4324/9781315701134-11>
- Imam Bashori. (2013). *Peran Guru Terhadap Kesiapsiagaan Sekolah Dalam Menghadapai Bencana Banjir*. Surakarta
- Jabar, H. (1995). pengaruh pemberdayaan pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas masyarakat. *Repository,Uin.Suska*, 3(April), 63–64. [http://repository.uin-suska.ac.id/7125/4/BAB III.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/7125/4/BAB%20III.pdf)
- Mansur, Y. (2015). Implementasi Good Governance dalam peningkatan kualitas pelayanan Pemerintah kecamatan tanah putih kabupaten rokan hilir [UIN SUSKA RIAU]. [http://repository.uin-suska.ac.id/13155/7/7. BAB II_2018385ADN.pdf](http://repository.uin-suska.ac.id/13155/7/7_BAB%20II_2018385ADN.pdf)
- Muchammad, R(2018). *Buku Ajar Manajemen Bencana dan Desa Tangguh Bencana*, (Yogyakarta: CV Mine, 2018),93
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (1st ed.). Remaja Rosdakarya.
- Nugrahani, F. (2014). *Konsep dasar penelitian*. Cakra Books. <https://docplayer.info/89886378-Metode-penelitian-kualitatif.html>
- Nurillah, S., Maulana, D., & Hasanah, B. (2022). Manajemen Mitigasi Penanggulangan Bencana Banjir Oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Cilegon di Kecamatan Ciwandan. *JDKP Jurnal Desentralisasi Dan Kebijakan Publik*, 3(1), 334–350. <https://doi.org/10.30656/jdkp.v3i1.4613>
- Paal, K., Sigarlaki, N. T., & Sambiran, S. (2017). IMPLEMENTASI PROGRAM REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI KORBAN BANJIR DI KOTA MANADO (Studi di Kecamatan Paal Dua). *Jurnal Eksekutif*, 1(1).
- Parmadi, J., & Publik, K. (2020). *Jurnal Pemerintahan dan Keamanan Publik (JP dan KP)*. 2(2), 139–146.
- Pramono, B (2009). *Teknik Mtigasi dan Tanah Longsor*, (Balikpapan: Tropenbos

International Programme, 2009),38

- PRASETYO, S.S.T., M.Si, H. (2020). KABUPATEN ROKAN HULU DALAM ANGKA 2020 (S. Syardiansah (ed.); 1st ed.). BPS Kabupaten Rokan Hulu. <https://doi.org/1102001.1407>
- Rizana, W., & Alhadi, Z. (2021). Efektivitas Peran BPBD Dalam Upaya Rehabilitasi Dan Rekonstruksi Rumah Masyarakat Pasca Bencana Banjir Di Nagari Tanjung Sani Kabupaten Agam. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 193–199. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2112>
- Robert, A. (2019). PENANGGULANGAN BENCANA BANJIR KABUPATEN INDRAGIRI HILIR. *Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik UNJA*, 3(1). https://www.minsal.cl/wp-content/uploads/2019/01/2019.01.23_PLAN-NACIONAL-DE-CANCER_web.pdf
- SARI, D. A. (2017). PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM UPAYA REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA BANJIR DI KABUPATEN SAMPANG (Studi Kasus di BPBD Kabupaten Sampang) [UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2017]. In UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG 2017. <http://eprints.umm.ac.id/id/eprint/54368>
- Seran Remigius. (2018). Strategi Pemerintah Republik Indonesia dalam Penanganan Masalah Pelintas Batas Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Hubungan Internasional*. Vol.XI 2018,pp 171-189
- Sinaga, L. C. (2013). Problematika Rehabilitasi dan Rekonstruksi Studi Kasus Pasca Bencana Tsunami Mentawai 2010. *Jurnal Penanggulangan Bencana*, 4, 27–38.
- Sugiri, L. (2019). PERANAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT. *Nafas Pustaka*, 7(1), 1–45. <https://media.neliti.com/media/publikations/220751-peranan-pemerintah-daerah-dalam-pemberda.pdf>
- Sunaryo, Bambang. (2013). *Kebijakan Pembangunan Destinasi Wisata : Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta : Gava Media.
- Suryadi, N. (2020). Peran Pemerintah Dalam Menanggulangi Banjir Di Kota Samarinda. *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 2020(2), 425–436.
- Tumanggor, B. F., & Wibowo, E. K. (2021). Motivasi Kerja dan Kinerja Pegawai Negeri Sipil Pasca Implementasi Kebijakan Pengalihan Jabatan Struktural Eselon III, IV dan V ke Jabatan Fungsional di Pemerintah Pusat dan Daerah. *Jurnal Sumber Daya Aparatur*, 3(1), 57–70.
- Warsono, H (2019). *Kolaborasi Penanganan Bencana*, (Bandung Barat: Trim Komunikata, 2019),115